

**STRATEGI BERTAHAN: PILIHAN AGAMA ETNIS TIONGHOA DI
TELUK BETUNG PADA MASA ORDE BARU (1970-1998)**

(Skripsi)

Oleh

EKA NURUL KIROMAH

NPM 2213033076



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

STRATEGI BERTAHAN: PILIHAN AGAMA ETNIS TIONGHOA DI TELUK BETUNG PADA MASA ORDE BARU (1970-1998)

Oleh

EKA NURUL KIROMAH

Kebijakan negara pada masa Orde Baru 1970-1998 melalui TAP MPR No. IV/MPR/1978 mewajibkan pencantuman salah satu agama resmi dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), sementara kepercayaan tradisional seperti Konghucu tidak diakui. Kondisi ini mendorong etnis Tionghoa di Teluk Betung menyesuaikan identitas keagamaannya demi memperoleh keamanan administratif dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi bertahan dalam menghadapi kebijakan negara mempengaruhi identitas agama etnis Tionghoa Teluk Betung pada masa Orde Baru 1970-1998 dengan metode historis meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi dengan pengumpulan data kepustakaan, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam menghadapi kebijakan negara pada masa Orde Baru 1970-1998 Etnis Tionghoa Teluk Betung menggunakan perspektif strategi bertahan James C Scott meliputi Public Transcript (Kepatuhan di Ruang Publik), Hidden Transcript (Perlawanan Tersembunyi), Everyday Forms of Resistance (Perlawanan Sehari-hari), dan Survival Strategy (Strategi Bertahan) yang menghasilkan bahwa pilihan agama Kristen (Katolik dan Protestan) menjadi dominan dalam kolom KTP etnis Tionghoa di Teluk Betung. Pilihan ini didorong oleh pertimbangan administratif, keamanan, penerimaan sosial, serta pengalaman diskriminasi dan stigma politik pada masa Orde Baru 1970-1998. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi bertahan pilihan agama etnis Tionghoa di Teluk Betung pada Masa Orde Baru 1970-1998 menghasilkan dominasi pilihan identitas agama Kristen.

Kata kunci: Etnis Tionghoa, Identitas agama, Kebijakan Orde Baru

ABSTRACT

SURVIVAL STRATEGIES: RELIGIOUS CHOICES OF ETHNIC CHINESE IN TELUK BETUNG DURING THE NEW ORDER ERA (1970-1998)

By

EKA NURUL KIROMAH

State policy during the New Order era (1970-1998), through MPR Decree No. IV/MPR/1978, required the inclusion of one official religion on the Resident Identity Card (KTP), while traditional beliefs such as Confucianism were not recognized. This situation forced ethnic Chinese in Teluk Betung to adjust their religious identity to achieve administrative and social security. This study aims to determine the survival strategies in facing state policies that influenced the religious identity of the Chinese ethnic group in Teluk Betung during the New Order era (1970-1998). This study uses historical methods including heuristics, criticism, interpretation, and historiography. This method involves collecting library data, documentation, and interviews. The results of this study indicate that in facing state policies during the New Order period 1970-1998, the Teluk Betung Chinese ethnic group used James C Scott's survival strategy perspective including Public Transcript (Compliance in Public Space), Hidden Transcript (Hidden Resistance), Everyday Forms of Resistance (Everyday Resistance), and Survival Strategy (Survival Strategy) which resulted in the choice of Christianity (Catholic and Protestant) becoming dominant in the KTP column of the Chinese ethnic group in Teluk Betung. This choice was driven by administrative considerations, security, social acceptance, as well as experiences of discrimination and political stigma during the New Order period 1970-1998. This study concludes that the survival strategy of the Chinese ethnic group's choice of religion in Teluk Betung during the New Order period 1970-1998 resulted in the dominance of the choice of Christian religious identity.

Keywords: *Ethnic Chinese, Religious Identity, New Order Policy*

**STRATEGI BERTAHAN: PILIHAN AGAMA ETNIS TIONGHOA DI
TELUK BETUNG PADA MASA ORDE BARU (1970-1998)**

Oleh

EKA NURUL KIROMAH

**Sebagai Salah Satu untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Sripsi : **STRATEGI BERTAHAN: PILIHAN AGAMA ETNIS TIONGHOA DI TELUK BETUNG PADA MASA ORDE BARU (1970-1998)**

Nama Mahasiswa : **Eka Nurul Kiromah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2213033076**

Jurusan : **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

Program Studi : **Pendidikan Sejarah**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



1. MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197009132008122002

Dr. Sumargono, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198801082019031012

2. MENGETAHUI

Ketua Jurusan
Ilmu Pengetahuan Sosial,

Koordinator Program Studi
Pendidikan Sejarah,

Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.
NIP. 197411082005011003

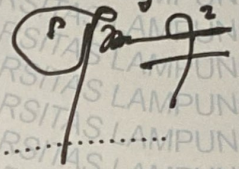
Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197009132008122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

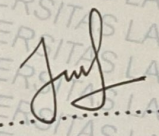
Ketua

: Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.



Sekretaris

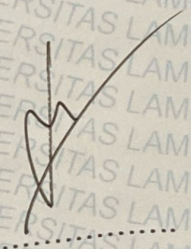
: Dr. Sumargono, M.Pd.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Yusuf Perdana, S.Pd., M.Pd.



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



: Dr. Alhet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198705042014041001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Juni 2026

SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Nurul Kiromah
NPM : 2213033076
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/FKIP Unila
Alamat : Jl. Ciwangi, Desa Cipadang, Kec. Gedongtataan,
Kab. Pesawaran

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 17 Juni 2026



Eka Nurul Kiromah

NPM. 2213033076

RIWAYAT HIDUP



Eka Nurul Kiromah lahir pada tanggal 15 Desember 2003 di Tangerang. Putri pasangan dari bapak Purwadi dan Ibu Asih Darmawati merupakan anak ke 1 dari dua bersaudara, bertempat tinggal di Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kab Pesawaran, Provinsi Lampung. Pendidikan yang di tempuh. Sekolah Dasar di SD Negeri 34 Gedong Tataan pada Tahun 2010 kemudian lulus pada Tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 19 Pesawaran dan Lulus pada Tahun 2019, meneruskan pendidiks ke SMA Negeri 1 Gedong Tataan dan Lulus pada Tahun 2022. Kemudian penulis tercatat sebagai mahasiswa perguruan tinggi negeri Universitas Lampung pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Jurusan Pendidikan Sejarah pada Tahun 2022. Pada Semester V penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rawa Ragil, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang dan menjalani program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMP Negeri 3 Rawa Pitu. Pada saat menjadi mahasiswa, Penulis pernah mengikuti Volunteer Desa Binaan BEM U KBM Unila 2026 di Desa Kiluan Negeri dan MBKM Program Technopreneurship Mahasiswa (PROTEKSI). Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Strategi Bertahan: Pilihan Agama Etnis Tionghoa Pada Masa Orde Baru (1970-1998)”**

MOTTO

“Identitas bukan sesuatu yang kita bawa sejak lahir, tetapi sesuatu yang terbentuk melalui perjalanan waktu”

-Stuart Hall

“Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”

-Soekarno

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang maha esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang selalu menyertai Setiap Langkah perjalanan ini.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan terbaik sepanjang masa. Dengan penuh rasa syukur, karya ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku Ayah Purwadi dan Ibu Asih Darmawati.

Terima kasih yang tak terhingga ku ucapkan kepada kedua orang tua ku tercinta, Ayah dan Ibu, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang. Tanpa restu, dukungan moril dan materil dari kalian, perjalanan panjang dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan mungkin saya lalui. Segala doa dan pengorbanan kalian menjadi semangat terbesar dalam setiap langkah perjuangan

Untuk Almamaterku Tercinta

“UNIVERSITAS LAMPUNG”

SANWANCANA

Allhamdulillahhirobbil'aalamin,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis skripsi yang berjudul “STRATEGI BERTAHAN: PILIHAN AGAMA ETNIS TIONGHOA DI TELUK BETUNG PADA MASA ORDE BARU (1970-1998)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah, dosen Pembimbing Akademik, dan selaku dosen Pembimbing I skripsi penulis, terima kasih banyak Ibu atas segala segala

saran, bimbingan, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.

7. Bapak Dr. Sumargono, S.Pd., M.Pd. selaku dosen Pembimbing II skripsi penulis, terima kasih banyak Bapak atas segala saran, bimbingan, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
8. Bapak Yusuf Perdana, S.Pd., M.Pd. selaku dosen Pembahas skripsi penulis, terimakasih banyak Bapak atas segala saran, bimbingan, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
9. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, dan para pendidik di Universitas Lampung pada umumnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
10. Teruntuk adikku dan Kakek Nenek Tercintaku yang paling ku sayangi Almira Darma Purwadi, Kakek Sudirman dan Nenek Suniyati terima kasih sudah banyak mendo'akan, melimpahkan perhatian dan dukungan disetiap harinya.
11. Teruntuk sahabat dekatku, Annisa Fitriani dan Leadya Haqtarina Kawedar Terimakasih atas dukungan, bantuan, dan kebersamaan yang telah kalian berikan sejak awal pertemanan, hingga saat ini. Terimakasih sudah menjadi rumah, dan selalu menguatkan disetiap langkahku
12. Teruntuk sahabat dekatku dalam masa perkuliahan Chintia Putri Purwoadi, Puti Nur Afni, Shabita Erliza, Natasya Nurma Sari, Zalfa Izzati Handini, Indira Anastasya, Mega Suci, dan Bunga Gesya. Terimakasih atas kebersamaannya selama perkuliahan, dan sudah menjadi pendengar yang baik serta memberikan semangat.
13. Lisa Lorena. Terimakasih atas dukungan, bantuan, dan kebersamaan yang telah diberikan sejak awal pertemanan, hingga saat ini. Terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik pemberi semangat.
14. Kakak-kakak tingkat di Program Studi Pendidikan Sejarah terima kasih karena sudah banyak membantu.

15. Teman-teman seperjuangan di Pendidikan Sejarah angkatan 2022, terima kasih atas dukungan, semua kenangan indah, dan kebersamaannya.
16. Teman-teman KKN Desa Rawa Ragil, Indah, Nina, Melaicka, Aqila, Dina, Taufiq, Isa, Ana, dan Fitri. Terima kasih atas dukungan, dan semua kebersamaannya.

Semoga hasil penulisan penelitian ini akan dapat berguna serta bermanfaat bagi kita semua. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuannya, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan atas semua yang telah kalian berikan.

Bandar Lampung, 17 Juni 2026

Eka Nurul Kiromah
2213033076

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Berpikir.....	9
1.6 Paradigma Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Konsep Perlawanan.....	11
2.1.1 Konsep Strategi Bertahan	11
2.1.2 Konsep Identitas Etnis Tionghoa.....	12
2.1.3 Konsep Negara	14
2.1.4 Konsep Diskriminasi	15
2.1.5 Konsep Agama	17
2.1.6 Konsep Teluk Betung	18
2.1.7 Konsep Orde Baru	19
2.2 Penelitian Terdahulu	20
III. METODE PENELITIAN	23
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	23
3.2 Metode Penelitian	23
3.2.1 Heuristik	24
3.2.2 Kritik Sumber	27
3.2.3 Interpretasi	27
3.2.4 Historiografi	28
3.3 Penentuan Informan	28
3.3.1 Informan	28
3.3.2 Teknik Penentuan Informan	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.4.1 Teknik Kepustakaan	31
3.4.2 Teknik Wawancara.....	32

3.4.3 Teknik Dokumentasi	34
3.5 Teknik Analisis Data.....	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil	37
4.1.1 Sejarah Kedatangan dan Terbentuknya Pemukiman Etnis Tionghoa di Teluk Betung.....	37
4.1.2 Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Status Masyarakat Etnis Tionghoa Teluk Betung 1970-1978.....	44
4.1.3 Kebijakan Pencantuman Agama dalam KTP 1978-1998.....	57
4.1.4 Asimilasi dan Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa di Teluk Betung pada Masa Orde Baru 1970-1998.....	64
4.1.5 Pilihan Agama Etnis Tionghoa Sebagai Identitas dan Strategi Bertahan pada Masa Orde Baru 1970-1998.....	70
4.1.5.1 Pilihan Agama Etnis Tionghoa Teluk Betung Sebagai Bentuk Identitas Era Orde Baru 1970-1998....	70
4.1.5.2 Strategi Bertahan Etnis Tionghoa Teluk Betung Melalui Pilihan Agama Era Orde Baru 1970-1998	84
4.1.6 Implikasi dan Berakhirnya Kebijakan Kolom Agama Era Orde Baru 1990-1998	95
4.1.6.1 Dampak Terhadap Identitas Budaya Etnis Tionghoa Teluk Betung 1990-1998	95
4.1.6.2 Berakhirnya Kebijakan Kolom Agama Etnis Tionghoan Teluk Betung era Orde Baru 1990-1998	98
4.2 Pembahasan.....	102
4.2.1 Analisis Pilihan Agama Etnis Tionghoa Teluk Betung Era Orde Baru 1970-1998 dalam Teori Strategi Bertahan James C. Scott	102
V. KESIMPULAN DAN SARAN	110
5.1 Kesimpulan	110
5.2 Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 4.1 Pola Migrasi Etnis Tionghoa ke Asia Tenggara	38
Gambar 4.2 Lokasi Pelabuhan Teluk Betung (Pelabuhan Cengkareng).....	41
Gambar 4.3 Inpres RI No. 14 Tahun 1967	45
Gambar 4.4 Sekolah SR/SMP Tionghoa Sin Tjung (Sincung)	48
Gambar 4.5 Arsip Surat Bukti Kewarganegaraan (SBKRI)	52
Gambar 4.6 TAP MPR No. IV/MPR/1978	59
Gambar 4.7 Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000	99

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Daftar Informan Peneliti	30
Tabel 1.1 Instrumen Wawancara.....	123
Tabel 1.2 Hasil Wawancara Informan Pertama	126
Tabel 1.3 Hasil Wawancara Informan Kedua	131
Tabel 1.4 Hasil Wawancara Informan Ketiga.....	135
Tabel 1.5 Hasil Wawancara Informan Keempat	139
Tabel 1.6 Hasil Wawancara Informan Kelima.....	144
Tabel 1.7 Hasil Wawancara Informan Keenam	148
Tabel 1.8 Hasil Wawancara Informan Ketujuh.....	152
Tabel 1.9 Hasil Wawancara Informan Kedelapan	156

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	118
Lampiran 2. Surat Penelitian Kelurahan Pesawahan Teluk Betung	119
Lampiran 3. Balasan Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	120
Lampiran 4. Balasan Surat Izin Kecamatan Teluk Betung	121
Lampiran 5. Balasan Surat Izin Kelurahan Teluk Betung	122
Lampiran 6. Instrumen Wawancara Etnis Tionghoa di Teluk Betung Generasi Tua	123
Lampiran 7. Transkrip Wawancara Etnis Tionghoa di Teluk Betung Generasi Tua	126
Lampiran 8. Transkrip Wawancara Informan Kedua	131
Lampiran 9. Transkrip Wawancara Informan Ketiga	135
Lampiran 10. Transkrip Wawancara Informan Keempat	139
Lampiran 11. Transkrip Wawancara Informan Kelima	144
Lampiran 12. Transkrip Wawancara Informan Keenam	148
Lampiran 13. Transkrip Wawancara Informan Ketujuh	152
Lampiran 14. Transkrip Wawancara Informan Kedelapan	156
Lampiran 15. Peneliti dengan Ongbihwa	160
Lampiran 16. Peneliti dengan Suryani	160
Lampiran 17. Peneliti dengan Ci A Kim	161
Lampiran 18. Peneliti dengan Tjang Eang Suan (Elis)	161
Lampiran 19. Peneliti dengan Ci Meri	162
Lampiran 20. Peneliti dengan Li Wang Ping (Karmilawati)	162
Lampiran 21. Peneliti dengan Devi	163
Lampiran 22. Peneliti dengan Dora	163

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etnis Tionghoa di Indonesia pernah dianggap sebagai “orang asing” di negeri sendiri. Dua tahun sesudah kudeta presiden Soekarno oleh Soeharto, mulai terjadi sentiment anti Tionghoa yang semakin parah pada akhirnya memaksa pemerintahan Presiden Soeharto harus menetapkan kebijakan dasar untuk meredam sentimen itu (Dawis, 2010). Pada masa Orde Baru (1970-1998), rezim pemerintahan Indonesia di bawah kekuasaan Presiden Soeharto menerapkan berbagai kebijakan politik identitas yang secara signifikan memengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan agama masyarakat, termasuk komunitas Etnis Tionghoa. Soeharto menuntut asimilasi total, tiga pilar masyarakat Tionghoa telah dihapus yaitu organisasi, pers, dan sekolah (Suryadinata, 2023).

Tahun 1970-an menjadi awal penting karena pada masa ini mulai muncul tekanan administratif dan sosial agar setiap warga negara mencantumkan agama dalam kartu tanda penduduk. Paham asimilasi yang semula ide pembauran ke dalam bangsa Indonesia telah berubah menjadi proses peleburan secara menyeluruh. Konsep asimilasi sendiri sebenarnya sudah di rumuskan sejak tahun 1960an sebelum ketentuan resmi kolom agama pada tahun 1978 melalui TAP MPR Nomor IV/MPR/1978, yang menyatakan bahwa setiap warga wajib memilih salah satu agama resmi (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha) untuk dicantumkan dalam dokumen kependudukan. Orang-orang Tionghoa seharusnya secara alami dapat berbaur dengan orang-orang pribumi. Interaksi sosial yang semakin intens akan membuat pembauran tersebut berjalan dengan sendirinya. Asimilasi yang berjalan secara alami akan melahirkan sebuah bangsa yang memiliki sifat toleransi. Namun kekuasaan Orde Baru, asimilasi cenderung kearah pemaksaan ganti nama, kawin campur, dan pindah agama. Sejak berdirinya rezim Orde Baru, terdapat keyakinan bahwa Etnis Tionghoa tidak memiliki sentimen kebangsaan. Orang-orang

Tionghoa dianggap lebih menerima tanah kelahiran leluhurnya di Tiongkok dari pada Indonesia. Atas dasar pemikiran tersebut, mulai tumbuh pemikiran bahwa Etnis Tionghoa adalah kaum yang pro komunis, hal ini disebabkan Tiongkok merupakan negara komunis. Pemikiran Etnis Tionghoa tersebut yang kemudian melahirkan kebijakan pelarangan agama dan pembatasan adat-istiadat Tionghoa (Hoon, 2012).

Menurut peneliti di CRCS UGM, Samsul Maarif, kolom agama baru diwajibkan dalam KTP dan Kartu Keluarga mulai tahun 1978, dengan dasar TAP MPR No. 4 Tahun 1978 yang mensyaratkan pencantuman salah satu dari lima agama resmi, sebelum itu kolom agama ini tidak ada. Hal ini berkaitan dengan upaya politik Orde Baru untuk mengendalikan ideologi dan mencegah ekspansi komunisme pasca-G30S. TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 adalah keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menetapkan garis-garis besar Haluan negara sebagai kerangka pembangunan nasional lima tahunan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. TAP MPR ini menetapkan bahwa aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah agama, melainkan dianggap sebagai bagian dari kebudayaan. Akibatnya, mulai tahun 1978, dokumen resmi seperti KTP dan KK wajib mencantumkan agama, tetapi hanya lima agama resmi yang mencantumkan agama (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha). Penghayat kepercayaan atau kelompok ataupun individu yang mengikuti ajaran leluhur yang diwariskan turun-temurun tidak diperbolehkan mencantumkan keyakinannya karena dianggap tidak memenuhi definisi “agama” menurut kebijakan itu (Suryadinata, 2003).

Krisis kewarganegaraan Tionghoa ini terjadi karena tidak ada suatu paradigma yang mampu mempertemukan faktor Etnisitas dan nasionalitas (Lan, 2014). Dalam konteks historis, ada tiga krisis kewarganegaraan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Pertama, pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 10 1959 yang berisi larangan Etnis Tionghoa untuk melakukan perdagangan di luar daerah Tingkat I atau daerah pedesaan setelah 31 Desember 1959. Kedua, Instruksi Presiden No. 14 1967 yang melarang segala sesuatu yang berbau Cina. Segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Cina tidak boleh dilaksanakan lagi. Di samping itu, masyarakat keturunan Tionghoa masih dicurigai masih memiliki ikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya dan diragukan rasa nasionalisme mereka terhadap negara

Indonesia. Oleh sebab itu, keluarlah kebijakan yang sangat diskriminatif. Selain itu, diterbitkannya surat edaran No. 06/Preskab/6/67 mengenai perubahan nama (Dawis, 2013).

Pemerintah Orde Baru melakukan pelaksanaan berkelanjutan atas perjanjian Dwi Kewarganegaraan dan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Dicabutnya perjanjian Dwi Kewarganegaraan ini membuat anak-anak dari Orang Tionghoa WNA harus melalui proses “naturalisasi” apabila ingin menjadi WNI. Hal tersebut jelas sangat rumit dan mahal. Selain itu orang-orang Tionghoa yang ingin di naturalisasi masih harus di seleksi Ketika melamar untuk di naturalisasi. Seleksi yang dimaksud adalah dengan melihat latar belakang pelamar. Prosedur tersebut tentu mengusik orang-orang Tionghoa WNI karena mereka diperlakukan sama dengan Tionghoa WNA. Dalam pemberian KTP, orang-orang Tionghoa Indonesia memperoleh KTP dengan kode khusus untuk menandai “keasingan” mereka walaupun sudah melalui proses naturalisasi (Hoon, 2012).

Kebijakan terkait kolom agama di KTP ini memberikan peran terhadap masyarakat termasuk Etnis Tionghoa yaitu adanya pemaksaan identitas dan diskriminasi administratif sehingga keberadaan kolom agama wajib diisi salah satu agama resmi, banyak warga yang terpaksa mencantumkan agama lain demi ama administratif. Contohnya, penganut Konghucu memilih masuk ke agama lain. Bahkan ada juga yang mengalami kesulitan serius dalam urusan sipil akibat pengosongan kolom agama seperti, penolakan sistem elektronik, pengurusan akta kelahiran, pernikahan, pekerjaan, hingga akses ke bank. Selain itu terdapat hambatan dalam Pendidikan dan layanan publik, disekolah siswa yang keluarganya mencantumkan agama dalam KTP otomatis diwajibkan mengikuti mata pelajaran agama yang mungkin tidak sesuai dengan kepercayaan aslinya. Kolom agama di KTP juga memicu diskriminasi pada penghayat kepercayaan yang dituding sebagai ateis dengan stigma kafir atau sesat sehingga mereka diasingkan secara sosial dan dijauhi masyarakat. Kolom agama memperkuat narasi identitas religious yang homogen, dan mempersempit ruang warga mengekspresikan keyakinan secara seutuhnya, menunjukkan orientasi Orde Baru terhadap stabilitas dan homogenitas ideologis, bukan penghormatan terhadap pluralisme masyarakat.

Dalam upaya menciptakan stabilitas nasional dan integrasi sosial, pemerintah Orde Baru juga menetapkan berbagai regulasi yang secara tidak langsung maupun langsung membatasi ekspresi identitas Etnis dan keagamaan kelompok minoritas Etnis Tionghoa. Dalam konteks tersebut, agama menjadi salah satu aspek penting dalam pembentukan identitas resmi warga negara, terutama melalui pencantuman agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada masa Orde Baru, negara hanya mengakui lima agama resmi (Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha), sedangkan status Konghucu belum diakui secara efektif selama Orde Baru. Akibatnya, banyak warga Tionghoa yang secara tradisional menganut sinkretisme antara Konghucu, Buddha, dan kepercayaan tradisional. Jadi, terpaksa memilih agama yang diakui negara untuk memenuhi persyaratan administratif dan sosial. Dalam banyak kasus, pilihan tersebut jatuh pada Kristen (baik Katolik maupun Protestan). Banyak umat Konghucu yang memilih untuk mencatatkan agama mereka sebagai Kristen dalam KTP dan dokumen resmi lainnya. Hal ini dilakukan agar mereka dapat memperoleh hak-hak sipil dan administratif yang terbatas bagi mereka yang tidak terdaftar dalam salah satu agama yang diakui negara, tetapi juga sebagai strategi untuk melindungi diri dari diskriminasi. Konversi agama sendiri merupakan transformasi spiritual dari individu yang ditandai dengan sesuatu pergantian dari keyakinan semula ke keyakinan yang lain. Konversi agama bukan hanya berkaitan dengan usaha mengadopsi pengetahuan dalam agama baru, namun disertai usaha menjadikannya suatu pandangan hidup yang baru (Amaruli, 2015).

Pada 1998, terjadi puncak krisis kewarganegaraan terburuk Tionghoa di Indonesia. Perampokan, pembunuhan hingga pemerkosaan terlaksana terorganisasi dan canggih. Mereka yang bermukim di Jakarta, lokasi terparah, mulai gelisah menantikan jaminan masa depan keluarga yang terjebak dalam kategori minoritas bayangan. Di era Orde Baru, Soeharto memang telah memperkenalkan kebijakan asimilasi Etnis Tionghoa. Itu tercermin dalam kebijakan pemerintah untuk membatasi pendaftaran di sekolah menengah Tionghoa serta jumlah dan pengelolaan koran Tionghoa. Pribumi Indonesia dilarang masuk ke sekolah itu dan sejumlah besar koran asing ditutup. Kebijakan itu dipicu kecurigaan akan keterlibatan warga Tionghoa dengan golongan Partai Komunis Indonesia

(Suryadinata, 2014). Tahun 1998 ini menjadi simbol akhir dari krisis agama dan Etnis Tionghoa di Indonesia karena di tahun tersebut keterpurukan paling kuat sekaligus pembuka untuk reformasi dan pemulihan hak-hak budaya, agama, dan identitas Etnis yang sebelumnya ditekan berat selama Orde Baru. Reformasi mencabut kebijakan diskriminatif, legalisasi ekspresi budaya dan agama Etnis Tionghoa seperti Imlek dan Khonghucu.

Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 Tahun berkuasa, akibat tekanan krisis ekonomi asia, demonstrasi besar-besaran, serta kerusuhan yang terjadi yaitu kerusuhan Mei 1998 penyerangan terhadap Etnis Tionghoa. Lengsernya rezim Orde Baru membuka jalan bagi era reformasi ditandai perubahan politik, kebebasan media, dan demokratisasi Lembaga negara. Setelah Soeharto lengser, Presiden BJ Habibie menerbitkan instruksi presiden No. 26 Tahun 1998, yang memerintahkan pemberhentian penggunaan istilah “pribumi” dan “non pribumi” dalam semua kebijakan politik. Inpres ini merupakan symbol konkret berakhirnya diskriminasi adminitrasi terhadap Etnis Tionghoa dalam birokrasi dan kebijakan pemerintah. Setelah era Orde Baru, muncul berbagai kebijakan yang mencabut pelarangan terhadap budaya, agama, dan Bahasa Tionghoa seperti pencabutan Inpres No. 14/1967 yang melarang ekspresi budaya Tionghoa secara terbuka dicabut oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000, melalui Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000.

Rentang waktu 1970-1998 dipilih karena periode ini menandai masa rezim Orde Baru telah relatif stabil secara politik dan mulai menerapkan kebijakan asimilasi secara lebih sistematis, termasuk penyeragaman identitas kewarganegaraan dan pembatasan ekspresi budaya serta keagamaan etnis Tionghoa. Sementara itu, tahun 1998 dipilih sebagai batas akhir penelitian karena menjadi titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang menjadi penanda berakhirnya konteks structural yang membentuk strategi bertahan selama orde baru.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan menarik tentang dinamika identitas komunitas Etnis Tionghoa di Teluk Betung, Bandar lampung. Alasan pemilihan Teluk Betung sebagai studi kasus karena lokasi wilayah ini mempresentasikan ruang sosial yang strategis dalam mengkaji relasi antara negara, identitas, dan

strategi bertahan pada masa Orde Baru. Sejak masa kolonial, Teluk Betung telah menjadi salah satu pusat pemukiman awal etnis Tionghoa di Lampung. Lampung merupakan wilayah multietnis yang terbentuk melalui proses perpindahan penduduk dan transmigrasi sehingga menciptakan interaksi sosial dan budaya yang kompleks antar kelompok masyarakat (Agustina dkk, 2025). Kondisi tersebut turut memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat di Teluk Betung, termasuk dalam proses adaptasi etnis Tionghoa terhadap kebijakan negara pada masa Orde Baru.

Kebijakan negara terkait penyeragaman identitas dan pembatasan ekspresi kebudayaan Tionghoa termasuk penghapusan pengakuan terhadap agama Konghucu diimplementasikan konkret hingga ke tingkat lokal. Teluk Betung menjadi lokasi studi kasus yang tepat terutama dalam kebijakan nasional pencantuman agama pada KTP. Dalam konteks ini, pilihan agama oleh etnis Tionghoa tidak dapat dipahami semata sebagai keputusan keimanan, melainkan sebagai bentuk strategi adaptasi dan negosiasi identitas guna memperoleh rasa aman, legitimasi sosial, dan kemudahan akses terhadap struktur negara (Lisa dkk., 2022).

Karakteristik Teluk Betung sebagai Kawasan Pelabuhan dan pusat pemerintahan awal di Lampung memperlihatkan intensitas relasi antara negara dan kelompok minoritas. Kondisi ini memungkinkan peneliti dalam menelaah bagaimana etnis Tionghoa Teluk Betung merespons kebijakan yang bersifat diskriminatif bukan melalui perlawanan terbuka, melainkan strategi bertahan yang bersifat pragmatis dan simbolis, salah satunya melalui pilihan identitas agama resmi. Dengan demikian, Teluk Betung tidak hanya berfungsi sebagai lokasi penelitian, tetapi sebagai ruang analisis yang memperlihatkan secara jelas bagaimana kebijakan negara Orde Baru membatasi, dan membuat strategi bertahan Etnis Tionghoa dalam menghadapi tekanan struktural negara. Pilihan agama apa yang dipilih dalam KTP dan apakah pilihan ini murni administratif, ataukah ada dimensi sosial, politik, dan kultural yang melatarbelakanginya, atau apakah ada pertimbangan integrasi sosial, perlindungan hukum, atau bahkan strategi mobilitas sosial dalam pilihan tersebut (Octadynata et al., 2020).

Dengan Teori strategi bertahan (*survival strategy*) *James C. Scott* merujuk sebagai Pilihan respons etnis Tionghoa Teluk Betung terhadap kebijakan Orde Baru yang membatasi Ekspresi identitas budaya dan agama mereka, menganalisis kuasa negara dan kelompok minoritas Tionghoa serta memahami adaptasi bertahan etnis Tionghoa Teluk Betung. Oleh itu, Teori strategi Bertahan menjadi kerangka analitis utama untuk membaca pilihan Agama etnis Tionghoa di Teluk Betung sebagai bentuk upaya mempertahankan identitas dalam struktur kekuasaan Orde Baru.

Memahami alasan di balik pilihan agama Etnis Tionghoa di Teluk Betung era Orde Baru tidak hanya penting untuk merekonstruksi dinamika identitas minoritas di Indonesia, tetapi juga untuk mengkaji lebih dalam bagaimana relasi antara negara dan warga negara dibentuk melalui regulasi identitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang mendorong Etnis Tionghoa di Teluk Betung menentukan pilihan identitas agama dalam KTP selama era Orde Baru, serta implikasi sosial dan kultural dari pilihan tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik mengangkat sebuah penelitian dengan judul "**Strategi Bertahan: Pilihan Agama Etnis Tionghoa di Teluk Betung pada Era Orde Baru (1970-1998)**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah strategi bertahan dalam menghadapi kebijakan negara dapat mempengaruhi pilihan identitas agama Etnis Tionghoa Teluk Betung pada Era Orde Baru 1970-1998?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi bertahan dalam menghadapi kebijakan negara mempengaruhi pilihan identitas agama Etnis Tionghoa di Teluk Betung pada era Orde Baru (1970-1998).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan, adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini menambah khazanah kajian sejarah minoritas Etnis dan agama di Indonesia, terutama dalam konteks kebijakan negara dan respons masyarakat terhadap represi identitas. Memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana identitas Etnis dan keagamaan dibentuk, dinegosiasikan, dan dipertahankan dalam tekanan rezim politik yang represif.

2. Secara Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman langsung bagi peneliti dalam menggali sumber primer dan Menyusun narasi historis terkait hubungan negara dan kelompok Etnis Tionghoa di daerah Teluk Betung, yang selama ini kurang terungkap. Secara khusus, penelitian ini memperluas pemahaman peneliti mengenai sejarah terutama pilihan agama Etnis Tionghoa di Teluk Betung pada era Orde Baru 1970-1998.

b) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai realitas sosial politik yang dihaadapi Etnis Tionghoa selama Orde Baru, khususnya dalam hal identitas keagamaan di Teluk Betung, menyadarkan pentingnya toleransi.

c) Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pelajaran yang berkaitan dengan sejarah Indonesia, sosiologi agama, politik identitas, atau kajian Etnis. Menginspirasi penyusunan kurikulum yang lebih responsif terhadap isu keberagaman dan toleransi.

d) Bagi Masyarakat

Penelitian ini menumbuhkan kesadaran sejarah mengenai pengalaman komunitas Tionghoa di masa lalu, sehingga bisa menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, mendorong masyarakat untuk menghargai keberagaman identitas dan peran strategis agama dalam dinamika sosial.

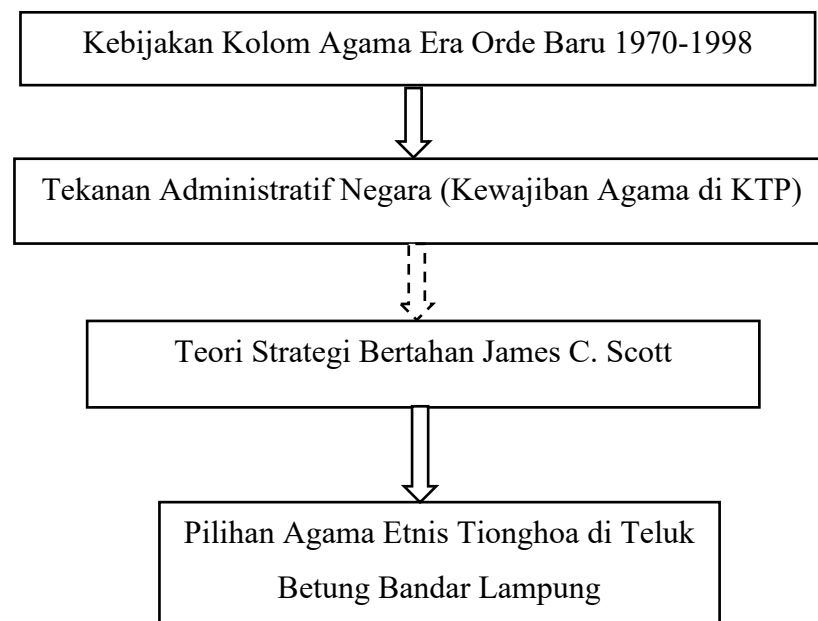
1.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini: Kebijakan kolom agama pada masa Orde Baru (1970–1998), Masyarakat Indonesia Mencantumkan Agama, Kemudian menggunakan Teori Strategi *C.Scott*, Etnis Tionghoa Teluk Betung Memilih Agama. Salah satu bentuk tekanan terhadap identitas kultural dan agama yang dihadapi Etnis Tionghoa di Teluk Betung adalah kewajiban mencantumkan agama yang diakui negara (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha) di dalam KTP. Karena agama-agama Tionghoa seperti Konghucu dan aliran kepercayaan tidak diakui atau dipinggirkan, maka Etnis Tionghoa Teluk Betung mengalami dilema identitas. Dalam kondisi ini, banyak yang memilih agama Kristen terutama Protestan dan Katolik karena Kesamaan struktur ibadah dan nilai moral (terutama dalam Katolik yang bersifat ritualistik, mirip dengan ajaran Konghucu atau Buddhisme), terdapat kemudahan akses ke institusi pendidikan dan sosial milik gereja, memiliki stigma yang lebih rendah dibandingkan Islam pada masa itu, terutama dalam lingkungan non-pribumi, dan terdapat perlindungan sosial dari komunitas Kristiani yang terorganisir dengan baik. Pemilihan agama Kristen oleh Etnis Tionghoa bukanlah sekadar pilihan religius, tetapi keputusan strategis yang kompleks. Ini menunjukkan adanya relasi antara identitas, kekuasaan, dan adaptasi dalam situasi opresif. Hal ini menciptakan identitas ganda, secara resmi beragama Kristen, namun dalam praktik sehari-hari Etnis Tionghoa di Teluk Betung tetap menjalankan tradisi dan kepercayaan leluhur seperti Konghucu atau praktik budaya Tionghoa lainnya.

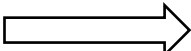
Situasi ini menimbulkan ketegangan internal dalam komunitas, terutama dalam mempertahankan warisan budaya di tengah tekanan untuk berasimilasi. Sebagai contoh, perayaan Imlek dan ritual leluhur sering dilakukan secara tertutup untuk menghindari pengawasan aparat. Hal ini menyebabkan generasi muda kurang mengenal akar budaya mereka sendiri, karena praktik budaya tersebut tidak lagi

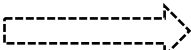
dilakukan secara terbuka dan kontinu. Gereja-gereja Tionghoa di Teluk Betung menjadi ruang aman bagi komunitas untuk menjalankan aktivitas sosial dan spiritual. Namun, dalam jangka Panjang, gereja juga menjadi arena asimilasi budaya, dimana nilai-nilai Tionghoa mulai tergantikan oleh nilai-nilai dominan dari agama yang diakui negara. Hal ini mempercepat proses erosi identitas budaya Etnis Tionghoa di kalangan generasi muda.

1.6 Paradigma Penelitian



Keterangan:

 / Garis Penghubung : **Hubungan Sebab-akibat**

 / Garis Putus-putus : **Alat Analisis Teori**

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dilakukan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan dijadikan topik penelitian, dimana dalam tinjauan Pustaka akan dicari teori atau konsep-konsep yang akan dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun tinjauan Pustaka dalam penelitian ini adalah:

2.1.1 Konsep Strategi Bertahan

Strategi bertahan (*survival strategy*) sering digunakan dalam kajian ilmu sosial untuk menjelaskan bagaimana individu atau kelompok menghadapi tekanan, keterbatasan, dan ancaman dari lingkungan sosial, politik, maupun ekonomi. Dalam konteks masyarakat minoritas seperti etnis Tionghoa pada masa Orde Baru strategi bertahan menjadi bentuk nyata dari usaha mereka menjaga eksistensi dan identitas di tengah tekanan kebijakan negara yang membatasi ekspresi budaya dan agama

Menurut (Scott, 1985) dalam karyanya *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, strategi bertahan merupakan bentuk perlawanan halus (*everyday resistance*) yang dilakukan oleh kelompok subordinat terhadap struktur kekuasaan yang menindas. Scott menegaskan bahwa tidak semua perlawanan dilakukan secara terbuka, banyak kelompok memilih strategi bertahan yang bersifat tersembunyi, seperti menyesuaikan diri, berpura-pura patuh, atau menciptakan simbol-simbol alternatif untuk mempertahankan identitas mereka.

Dalam konteks Orde Baru, teori Scott sangat relevan. Pemerintah saat itu menerapkan kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa, misalnya pembatasan penggunaan bahasa, nama, dan simbol budaya Tionghoa. Namun, di balik kepatuhan lahiriah, banyak masyarakat Tionghoa

menjalankan strategi bertahan: mereka menyesuaikan diri dengan aturan negara, tetapi tetap menjaga tradisi dan keyakinan mereka di ruang privat. Beberapa indikatornya mencakup *Public Transcript* (Kepatuhan di Ruang Publik), *Hidden Transcript* (Perlawanan Tersembunyi), *Everyday Forms of Resistance* (Perlawanan Sehari-hari), dan *Survival Strategy* (Strategi Bertahan) (Scott, 1985).

Dalam kasus etnis Tionghoa, strategi bertahan ini bisa berupa memilih agama resmi (seperti Kristen Katolik, Protestan, Islam, Hindu, dan Budha) agar diakui negara, namun di sisi lain tetap menjaga nilai-nilai budaya Tionghoa di dalam keluarga.

Teori strategi bertahan digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka analitis untuk membaca pilihan agama etnis Tionghoa di Teluk Betung pada masa Orde Baru. Mengacu pada pemikiran *James C. Scott*, pilihan Agama dipahami sebagai bentuk adaptasi identitas yang bersifat non-konfrontatif terhadap tekanan negara. Oleh itu, penelitian ini menempatkan pilihan agama bukan sebagai bentuk kepatuhan mutlak atau kehilangan identitas, melainkan sebagai strategi bertahan kelompok minoritas dalam mempertahankan eksistensi sosial dibawah dominasi negara.

2.1.2 Konsep Identitas Etnis Tionghoa

Identitas Etnis adalah konstruksi sosial yang merujuk pada kesadaran akan keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok etnik yang memiliki warisan budaya, sejarah, bahasa, nilai, dan simbol yang sama. Dalam konteks Indonesia, identitas Etnis Tionghoa merupakan salah satu identitas yang paling kompleks dan dinamis karena pembentukannya berlangsung dalam ruang negosiasi yang terus-menerus antara politik negara, stigma sosial, dan usaha mempertahankan warisan budaya.

Teori *Tajfel* mengatakan bahwa individu membentuk identitasnya melalui keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu dan membandingkannya dengan kelompok lain. Dalam situasi diskriminasi, kelompok minoritas cenderung melakukan strategi adaptif, termasuk mengaburkan atau

menyesuaikan identitas mereka untuk meningkatkan penerimaan sosial dan mengurangi risiko diskriminasi. *Social identity Theory Tajfel* ini menjelaskan bagaimana individu memilih identitas kelompok untuk mempertahankan harga diri atau keamanan sosial. Teori ini cocok untuk menganalisis mengapa orang memilih identitas agama tertentu dalam konteks tekanan negara.

“Social identity is defined as the individual’s knowledge that he belongs to certain social groups together with some emotional and value significance to him of the group membership. Diterjemahkan “Identitas sosial didefinisikan sebagai pengetahuan individu bahwa ia termasuk dalam kelompok sosial tertentu, disertai makna emosional dan nilai tertentu dari keanggotaan kelompok tersebut baginya”. (Tajfel, 1974).

Teori *Tajfel* ini relevan dengan judul penelitian ini karena menganalisis bagaimana dan mengapa komunitas Tionghoa mencoba masuk ke dalam “in group” melalui pilihan identitas agama, misalnya dengan berpindah ke agama-agama yang diakui seperti katolik, Kristen, islam, atau Budhha meskipun sebelumnya menganut konghucu. Relevansi lainnya etnis Tionghoa Orde Baru cenderung memilih strategi mobilitas sosial, yaitu mengubah identitas agama agar bisa diterima oleh negara dan masyarakat demi keamanan dan akses sosial.

Menurut Leo Suryadinata, identitas Tionghoa di Indonesia mengalami pasang surut seiring perubahan rezim politik. Di masa Orde Baru, Etnis Tionghoa dipaksa melebur ke dalam identitas nasional melalui kebijakan asimilasi, pelarangan bahasa dan simbol Tionghoa, serta diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan publik. Hal ini mendorong mereka untuk mengaburkan identitas etnik melalui strategi sosial, seperti mengganti nama, memilih agama resmi negara (seperti Kristen), dan menghindari keterlibatan politik. “Kebijakan Orde Baru lebih menekankan pada asimilasi daripada integrasi, sehingga identitas etnik harus dileburkan ke dalam identitas

nasional, yang dalam praktiknya berarti ‘menjadi seperti pribumi’.” (Suryadinata, 2008).

Konsep identitas dalam penelitian ini digunakan untuk melihat pilihan agama etnis Tionghoa tidak semata-mata sebagai ekspresi keimanan personal, melainkan sebagai identitas sosial yang dibentuk melalui interaksi dengan kebijakan negara. Pada masa Orde Baru, identitas keagamaan menjadi aspek yang di lembagakan secara administratif, sehingga mendorong etnis Tionghoa di Teluk Betung menegosiasikan identitas mereka agar sesuai kategori yang diakui negara. Dengan demikian identitas dipahami sebagai sesuatu yang dinamis dan kontekstual bukan statis.

2.1.3 Konsep Negara

Negara merupakan salah satu konsep paling mendasar dalam ilmu politik dan hubungan sosial, karena negara menjadi wadah utama bagi kekuasaan, otoritas, dan pengaturan kehidupan masyarakat. Dalam pandangan klasik, negara dipahami sebagai organisasi tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat di suatu wilayah tertentu. Menurut *Max Weber* (1922), negara adalah sebuah komunitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah dalam suatu wilayah tertentu. Definisi Weber ini menjadi sangat berpengaruh karena menegaskan tiga unsur penting: wilayah (territory), masyarakat atau komunitas manusia (people), dan legitimasi kekuasaan (legitimate use of force). Negara, dengan demikian, tidak sekadar merupakan organisasi politik, tetapi juga entitas yang memperoleh legitimasi dari masyarakat untuk menjalankan kekuasaannya (Weber, 1922).

Sementara itu, Harold J. Laski (1931) mendefinisikan negara sebagai “masyarakat teritorial yang terbagi antara pemerintah dan rakyatnya, dan dalam wilayah tertentu mengklaim supremasi terhadap asosiasi-asosiasi lainnya”. Pandangan Laski menekankan pada sifat teritorial dan hierarki kekuasaan yang menjadikan negara sebagai institusi tertinggi dalam struktur sosial. Artinya, negara memiliki hak eksklusif untuk menetapkan aturan dan

mengontrol organisasi sosial lain yang berada di dalam wilayahnya, termasuk lembaga agama, budaya, dan ekonomi (Laski, 1931).

Dari kedua definisi di atas, dapat dipahami bahwa negara memiliki empat unsur utama, yaitu: penduduk, wilayah, pemerintahan, dan kedaulatan. Penduduk adalah individu yang hidup dan menjadi bagian dari masyarakat negara tersebut, wilayah menjadi batas geografis dan hukum bagi berlakunya kekuasaan negara, pemerintahan berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan negara, dan kedaulatan adalah otoritas tertinggi yang membuat negara bebas dari campur tangan kekuatan luar maupun domestik. Dalam konteks penelitian tentang etnis Tionghoa di Teluk Betung pada masa Orde Baru, konsep negara penting untuk dipahami sebagai entitas yang memiliki kekuasaan untuk menentukan identitas warga negaranya. Negara pada masa Orde Baru tidak hanya berperan sebagai pengatur keamanan dan pembangunan, tetapi juga sebagai pengarah identitas sosial dan keagamaan melalui kebijakan-kebijakan yang menyentuh kehidupan pribadi warga negara. Dengan kata lain, negara tidak netral terhadap identitas etnis maupun agama, melainkan aktif membentuk dan mengarahkan keduanya demi stabilitas politik nasional.

Dalam konteks penelitian ini, konsep negara menjadi penting untuk memahami bagaimana negara Orde Baru tidak hanya berfungsi sebagai institusi administrative, tetapi juga sebagai actor dominan yang mengatur dan membatasi ekspresi identitas warga negara. Melalui kebijakan penyeragaman identitas, khususnya dalam pencantuman agama di KTP, negara secara langsung mempengaruhi pilihan identitas etnis Tionghoa di Teluk Betung. Oleh karena itu, negara dalam penelitian ini diposisikan sebagai struktur kekuasaan yang membentuk ruang gerak dan strategi adaptasi kelompok minoritas.

2.1.4 Konsep Diskriminasi

Diskriminasi merupakan perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan kategori sosial tertentu seperti ras, Etnis, agama, atau

kelas sosial. Dalam konteks studi ini, diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia tidak hanya terjadi dalam bentuk stereotip dan prasangka sosial, tetapi juga melalui kebijakan negara yang bersifat sistemik dan terstruktur, khususnya pada masa Orde Baru (Tajfel, 1981).

Konsep diskriminasi merujuk pada perlakuan yang berbeda, tidak adil, atau merugikan terhadap individu maupun kelompok tertentu berdasarkan identitas sosialnya, seperti etnis, agama, ras, bahasa, jenis kelamin, maupun status sosial. Diskriminasi terjadi ketika suatu kelompok diperlakukan secara tidak setara dibandingkan kelompok lain dalam memperoleh hak, akses, kesempatan, dan pengakuan dalam kehidupan sosial (Suryadinata, 2014).

Dalam konteks etnis Tionghoa pada masa Orde Baru, diskriminasi muncul melalui berbagai kebijakan negara yang membatasi ruang gerak kelompok Tionghoa, seperti pembatasan penggunaan bahasa Mandarin, pelarangan budaya Tionghoa, kewajiban mengganti nama, serta tidak diakuinya Konghucu secara efektif dalam administrasi negara. Akibatnya, etnis Tionghoa mengalami kesulitan dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, hingga pengurusan dokumen kependudukan. Kebijakan administratif seperti pencantuman agama dalam KTP menjadi alat negara untuk mengontrol identitas dan mengarahkan warga negara minoritas agar masuk dalam kategori yang "diakui" dan "diterima" secara resmi (Purdey, 2006).

Etnis Tionghoa yang mengganti agama resmi di KTP demi kelangsungan sosial bukan hanya mengalami tekanan eksternal, tetapi juga internalisasi nilai bahwa identitas asli mereka tidak "layak" diakui negara. Dalam konteks Etnis Tionghoa di masa Orde Baru, diskriminasi ini berlangsung dalam bentuk regulasi yang membatasi ekspresi identitas kultural dan agama, serta memaksa asimilasi sebagai syarat mendapatkan perlakuan yang setara. Strategi seperti memilih agama Kristen dalam KTP merupakan

respons adaptif terhadap tekanan diskriminatif yang bersifat struktural dan simbolik.

2.1.5 Konsep Agama

Agama merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan identitas individu dan kelompok. Ia bukan hanya sistem kepercayaan spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial, simbol budaya, dan instrumen legitimasi dalam masyarakat. Dalam konteks Etnis Tionghoa di Indonesia pada masa Orde Baru, agama memainkan peran yang kompleks baik sebagai bentuk ekspresi pribadi maupun strategi adaptasi terhadap tekanan sosial-politik. Dalam Ensiklopedia Indonesia agama dapat diartikan sebagai manusia yang mengakui dalam agamanya adanya yang suci manusia itu insyaf, bahwa ada suatu kekuasaan yang memungkinkan dan melebihi segala yang ada. Kekuasaan inilah yang dianggap sebagai asal atau khalik segala yang ada. Tentang kekuasaan ini bermacam-macam bayangan yang terdapat pada manusia, demikian pula cara membayangkannya. Demikianlah Tuhan dianggap oleh manusia sebagai tenaga ghaib di seluruh dunia dan dalam unsur-unsurnya atau khalik ruhani. Tenaga ghaib ini dapat menjelma antara lain dalam alam (animisme), dalam buku suci (Torat) atau dalam manusia (Kristus). Dari uraian tentang pengertian agama di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa agama pada dasarnya merupakan suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang memiliki akal untuk memegang peraturan Tuhan itu dengan kehendak sendiri, untuk mencapai kebaikan hidup dan kebahagiaan kelak di akhirat (Sodikin, 2003).

Konsep agama dalam penelitian ini, tidak hanya dipahami sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai kategori administratif yang dilembagakan oleh negara orde baru. Kewajiban pencantuman agama dalam dokumen kependudukan menjadikan agama sebagai instrument penting dalam relasi antara negara dan warga. Dalam konteks etnis Tionghoa di Teluk Betung kondisi ini mendorong agama menjadi ruang strategis untuk memperoleh pengakuan, keamanan, dan legitimasi sebagai warga negara. Etnis Tionghoa diposisikan sebagai kelompok minoritas yang berada dalam relasi kuasa

yang tidak seimbang dengan negara. Status minoritas tersebut mempengaruhi cara etnis Tionghoa merespons kebijakan orde baru, terutama dalam hal ekspresi identitas agama. Kondisi ini menjelaskan mengapa pilihan agama di Teluk Betung, perlu dipahami upaya mempertahankan keberlangsungan hidup sosial ditengah tekanan struktural.

2.1.6 Konsep Teluk Betung

Teluk Betung adalah salah satu kecamatan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, awalnya merupakan gabungan kota kembar dari Tanjung Karang dan Teluk Betung. Wilayah ini memiliki banyak jejak peninggalan berupa bangunan, kehidupan sosial masyarakat, pelabuhan tua, kawasan bersejarah serta persepsi lingkungan (*environmental perception*) tentang suatu seting oleh individu, didasarkan latar belakang budaya, nalar, dan pengalaman individu tersebut maupun kelompok (Setiawan, 2010).

Sejak dulu, Teluk Betung telah menjadi kota pelayanan perdagangan dan jasa bagi warganya. Berbatasan dengan Teluk Lampung, menjadikannya sebagai pusat kegiatan yang ramai, tempat transaksi perdagangan jual beli atau pertukaran barang (barter) kala itu. Kapal-kapal bersandar dengan membawa barang dagangan dari segala penjuru kota bahkan negara lain yang datang untuk singgah. Tidak terkecuali di daratan, aktivitas stasiun kereta api memegang peranan penting sebagai sarana transportasi barang juga manusia, sehingga sisa peninggalan yang ada saat ini masih dijaga dan terawat dengan baik, hanya stasiun besar yang masih beroperasi, sedangkan stasiun singgah sudah tidak terawat, bahkan rusak, atau bahkan hilang tidak berbekas karena tergerus oleh perkembangan pembangunan di suatu kota. Sekarang, teluk betung telah berkembang dan meninggalkan banyak jejak kenangan masa lalu dalam ruang kotanya, seperti stasiun kereta api, jalur rel kereta api, jembatan, bangunan, dermaga, pelabuhan tua, perairan (teluk lampung), jalan-jalan di sudut ruang kota, pohon, serta kampung tua Olok Gading (Lisa et al., 2022).

2.1.7 Konsep Orde Baru

Orde Baru merupakan rezim pemerintahan di Indonesia yang dimulai sejak Presiden Soeharto naik ke singgahsana kekuasaan pada tahun 1966 menggantikan Presiden Soekarno, dan berlangsung hingga Soeharto lengser pada tahun 1998. Orde Baru dikenal dengan ciri khas pemerintahan yang menekankan pada stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan penertiban sosial, namun juga dicirikan oleh otoritarianisme, pembatasan kebebasan politik, serta dominasi militer dalam kehidupan sipil (Schwarz, 1994).

Dalam konteks ini Era Orde Baru (1966-1998) terdapat penekanan terhadap segala bentuk perbedaan yang dianggap mengganggu integrasi nasional. Pemerintahan di bawah Presiden Soeharto mengembangkan model pembangunan nasional yang sangat menekankan pada keseragaman sosial dan politik, termasuk dalam hal identitas Etnis, agama, dan budaya. Khususnya Etnis Tionghoa mengalami tekanan yang signifikan, baik dalam bentuk kebijakan formal negara maupun tekanan sosial yang dilembagakan. Negara menerapkan politik asimilasi, bukan integrasi multikultural. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan ini adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 yang membatasi ekspresi budaya Tionghoa dan menekan penggunaan simbol-simbol ke Tionghoan di ruang publik, termasuk agama tradisional Tionghoa seperti Konghucu. Sejak tahun 1967, agama Konghucu tidak lagi diakui secara resmi oleh negara, sehingga umatnya dihadapkan pada dilema administratif dan sosial. Dalam sistem administrasi kependudukan, terutama pengisian kolom agama pada KTP, masyarakat Tionghoa yang sebelumnya menganut kepercayaan tradisional Tionghoa, seperti Konghucu, dipaksa secara tidak langsung untuk memilih satu dari lima agama resmi negara (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha). Pilihan agama ini tidak hanya mencerminkan aspek spiritual, tetapi juga pertimbangan sosial politik yaitu upaya mendapatkan “perlindungan” administratif dan sosial dalam tatanan masyarakat yang dikontrol ketat oleh negara (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1999)

Menurut Leo Suryadinata (2003), kebijakan Orde Baru terhadap Etnis Tionghoa bersifat "suspicious tolerance" toleransi penuh kecurigaan yang membuat minoritas ini hidup dalam keterpaksaan untuk menyesuaikan diri dengan mayoritas agar tidak dicurigai sebagai "unsur asing". Dengan demikian, pilihan identitas agama pada masa itu harus dilihat sebagai bagian dari proses negosiasi identitas, bukan sekadar ekspresi keimanan individual (Suryadinata, 2003)

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang memiliki judul “Regulasi Pemerintah Orde Baru Terhadap Agama Khonghucu di Indonesia (1966-1998)” karya yang di tulis oleh Ahmad Ainut Taufiq. Penelitian ini menggunakan metode Teknik pengumpulan data sebagai cara kerja meneliti, mengkaji dan menganalisis objek sasaran penelitian untuk mencari hasil atau kesimpulan tertentu. Melalui studi kepustakaan dan wawancara, peneliti dapat menemukan data dan informasi terkait bahan-bahan yang diteliti, baik dari perpustakaan Universitas, Perpustakaan kementerian agama RI, sumber-sumber kepustakaan berupa: Undang-undang yang dikeluarkan pemerintah, buku, jurnal dan lain sebagainya. Perbedaan skripsi Ahmad Ainut Taufiq dengan skripsi penulis yaitu, skripsi karya Ahmad Ainut Taufiq fokus utamanya pada kebijakan makro terhadap konghucu selama masa Orde Baru, menjelaskan regulasi pemerintah membatasi, menolak pengakuan, dan mendiskriminasi agama konghucu, sedangkan skripsi penulis berfokus pada respons Etnis Tionghoa di Teluk Betung terhadap kebijakan kolom agama Orde Baru dan pilihan identitas agama sebagai strategi bertahan, bukan hanya sebagai dampak dari regulasi. Reseach gap Taufiq menyoroti kebijakan negara, sedangkan penelitian saya meneliti respon dan strategi bertahan masyarakat Etnis Tionghoa di teluk betung.

2. Skripsi yang memiliki judul “Konversi Agama Masyarakat Tionghoa (Studi Sosio-Historis Konversi Agama Masyarakat Tionghoa Cirebon Tahun 1963- 1970)”. Karya yang ditulis oleh Rizky Riyadu Taufiq. Penelitian ini mengulas perjalanan masyarakat Tionghoa yang

berbondong-bondong berpindah agama karena factor sosiologis, politik, dan penyesuaian identitas. Persamaan skripsi milik Rizky Riyadu Taufiq dengan skripsi penulis yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus historis-sosiologis untuk fokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena dan pendekatannya lebih pada penelusuran naratif dan kontekstual. Perbedaan skripsi Rizky Riyadu Taufiq dengan penulis yaitu skripsi Rizky Riyadu Taufiq membahas peralihan keyakinan agama dikalangan masyarakat Tionghoa di Cirebon selama rentang waktu 1963-1970, sedangkan skripsi penulis membahas bagaimana tekanan negara Orde Baru memaksa Etnis Tionghoa di Teluk Betung memilih agama yang di akui sebagai pilihan Agama di KTP, bukan semata-mata karena konversi teologis, tapi sebagai strategi bertahan, penyesuaian administratif, dan upaya menghindari diskriminasi. Ini menghasilkan konsekuensi identitas antara pengakuan resmi dan praktik budaya tersembunyi. Research gap penelitian Rizky Riyadu Taufiq yaitu mengungkapkan dinamika konversi agama masyarakat Tionghoa di Cirebon pada masa transisi Orde Baru (1963-1970), kajiannya belum menyentuh bagaimana proses konversi tersebut berkembang menjadi strategi bertahan jangka Panjang dalam konteks regulasi yang lebih ketat di masa Orde Baru. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah pilihan identitas agama Etnis Tionghoa di teluk betung (1970-1998) sebagai bagian dari strategi sosial politik menghadapi tekanan negara dan diskriminasi.

3. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah jurnal berjudul “Tionghoa dalam Diskriminasi Orde Baru Tahun 1967-2000 yang ditulis oleh Laylatul Fitrya dan Sri Mastutu Purwaningsih dalam AVATARA, e-journal Pendidikan sejarah tahun 2013. Penelitian tersebut membahas kebijakan diskriminatif pemerintah Orde Baru terhadap etnis Tionghoa, khususnya komunitas Khong Hu Chu di Klenteng Boen Bio Surabaya. Fokus utama penelitian diarahkan pada dampak kebijakan asimilasi negara, seperti larangan penggunaan budaya Tionghoa, kebijakan pergantian nama, pembatasan penggunaan bahasa Mandarin,

serta tidak diakuinya agama Khong Hu Chu dalam administrasi negara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa setelah keluarnya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tahun 1978, banyak etnis Tionghoa yang akhirnya berpindah agama karena Khong Hu Chu tidak lagi diakui sebagai agama resmi negara. Kondisi ini menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi seperti KTP, Kartu Keluarga, paspor, hingga pencatatan perkawinan. Bahkan, dalam beberapa kasus, identitas agama dalam KTP diubah secara administratif menjadi Kristen, Islam, atau Buddha meskipun tidak sesuai dengan keyakinan yang sebenarnya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai kebijakan negara terhadap etnis Tionghoa pada masa Orde Baru, terutama dalam hal pencantuman agama dalam KTP dan dampaknya terhadap identitas keagamaan. Kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa pilihan agama tidak sepenuhnya didasarkan pada keyakinan pribadi, melainkan dipengaruhi oleh tekanan administratif dan kebutuhan untuk memperoleh rasa aman serta kemudahan akses terhadap layanan publik. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu tersebut. Jika penelitian Laylatul Fittrya lebih berfokus pada dampak kebijakan diskriminasi terhadap komunitas Khong Hu Chu di Surabaya secara umum, maka penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana etnis Tionghoa di Teluk Betung membentuk strategi bertahan melalui pilihan agama pada masa Orde Baru. Penelitian ini juga lebih menekankan pada hubungan antara negara, identitas, dan strategi bertahan dengan menggunakan teori dari James C. Scott, sehingga dapat menjelaskan bagaimana kepatuhan terhadap kebijakan negara sesungguhnya merupakan bentuk adaptasi dan negosiasi identitas di tengah tekanan sosial dan politik.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat masalah diatas maka dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman, maka dalam hal ini peneliti memberikan kejelasan tentang sasaran dan tujuan penelitian mencakup

1. Objek Penelitian : Pilihan Identitas Agama Etnis Tionghoa di Teluk Betung pada Masa Orde Baru (1970-1998).
2. Subjek Penelitian : Komunitas Etnis Tionghoa di Kelurahan Pesawahan.
3. Tempat Penelitian : Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.
4. Waktu Penelitian : Tahun 2025-2026
5. Bidang Ilmu : Sejarah

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode historis. Metode historis merupakan metode penelitian yang digunakan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau secara sistematis dan objektif berdasarkan sumber-sumber sejarah yang tersedia. Menurut *Louis Gottschalk*, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman serta peninggalan masa lampau untuk kemudian disusun Kembali dalam bentuk kisah sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Gottschalk, n.d.). Dalam penelitian sejarah, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti. Kuntowijoyo menjelaskan bahwa penelitian sejarah meliputi empat tahap utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode historis. Data diperoleh melalui studi arsip dan wawancara (sejarah lisan atau *oral history*) untuk

menggali pengalaman dan strategi bertahan Etnis Tionghoa di Teluk Betung pada masa Orde Baru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai suatu peristiwa atau untuk mengungkap dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Metode historis menurut Louis Gottchalk yang di terjemahkan oleh Nugroho Notosusanto (1984:31), metode historis adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu.

Tujuan penelitian dengan metode historis adalah membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi serta mensistesisikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan kesimpulan yang kuat (Sumadi Suryabrata, 2012).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka metode historis dengan pendekatan *oral history* adalah suatu prosedur sistematis yang digunakan dalam penelitian dan penulisan sejarah dalam penelitian STRATEGI BERTAHAN: PILIHAN AGAMA ETNIS TIONGHOA DI TELUK BETUNG PADA MASA ORDE BARU (1970-1998). Berikut ini merupakan penjabaran dari proses penelitian historis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, antara lain:

3.2.1 Heuristik

Heuristik merupakan tahapan pertama yang harus dilalui oleh peneliti sejarah. Heuristik adalah mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Secara bahasa, kata “heuristik” berasal dari bahasa Yunani yakni “*heuriskein*” yang artinya menemukan (Sukmana, 2021). Ada juga yang mengaitkan makna heuristik secara umum berasal dari akar yang sama dari kata *eureka* yang artinya “untuk menemukan”, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa heuristik adalah tahapan menemukan, mengumpulkan, dan mencari sumber sejarah untuk mengetahui segala kejadian, peristiwa, dan fenomene sejarah masa lalu yang relevan dengan penelitian (Sayono, 2021).

Menurut para ahli seperti Notosusanto (Sulasman, 2014) Heuristik merupakan kegiatan atau tahapan yang diarahkan pada penjajakan, pengumpulan dan pencarian sumber-sumber yang diteliti, baik itu terdapat di lokasi penelitian, sumber lisan maupun temuan benda.

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, skripsi, jurnal, serta arsip dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Proses pencarian dan pengumpulan sumber umumnya dilakukan melalui kegiatan bibliografi, yaitu penyusunan daftar dokumen yang diterbitkan dalam bentuk buku, artikel majalah, maupun bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan kajian sejarah (Sumargono, 2021).

Dalam penelitian ini heuristik digunakan sebagai upaya menggali pengalaman hidup dan strategi bertahan masyarakat Etnis Tionghoa di Teluk Betung dalam menghadapi tekanan identitas dari negara. Melalui strategi heuristic, peneliti tidak hanya memposisikan diri sebagai pengamat luar, tetapi juga secara aktif menelusuri dan menafsirkan pengalaman subjek berdasarkan konteks historis, tekanan politik Orde Baru, serta logika bertahan hidup komunitas Tionghoa.

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah kumpulan informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau kesaksian langsung dari seseorang yang menyaksikan peristiwa sejarah. Sumber ini berupa dokumen tertulis yang diciptakan pada sekitar waktu peristiwa sejarah, seperti surat kabar, arsip, prasasti, foto, rekaman, ataupun artefak (Kuntowijoyo 2003). Sumber primer sangat penting untuk mendapatkan informasi yang akurat dan absah mengenai peristiwa sejarah. Salah satu sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang menunjukkan keterkaitan pilihan agama Etnis Tionghoa di Teluk Betung pada masa Orde Baru 1970-1998, diantaranya:

1. TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis besar Haluan negara yang mengatur kolom agama yang harus di isi dari lima agama resmi yang diakui.
2. Instruksi Presiden RI No. 14 Tahun 1967 tentang Agama dan adat istiadat Cina

3. Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina
4. Arsip lokasi Pelabuhan Teluk Betung (Pelabuhan Cungkeng), Foto Onbekend KATLV.
5. Sumber data primer lainnya yaitu Warga Tionghoa generasi tua (usia 60 tahun ke atas sekarang) yang dulu mengubah agama di KTP di Teluk Betung atau masyarakat Tionghoa yang pernah mengalami atau menyaksikan atau mengetahui dinamika sosial pilihan agama pada masa Orde Baru.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder dalam ilmu sejarah merupakan informasi yang disampaikan secara tidak langsung melalui pihak yang menjadi saksi mata ataupun orang yang berada dalam peristiwa sejarah. Datanya diantaranya yaitu karya tulis buku yang berisi sumber sekunder, dokumentasi ataupun rekaman yang dibuat setelah peristiwa terjadi yang mengacu pada sumber primer yang sudah ada. Contohnya, buku sejarah, artikel ilmiah, surat kabar yang menginterpretasikan peristiwa masa lalu (kuntowijoyo 2003). Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Buku Leo Suryadinata, "Pribumi, Minoritas, Tionghoa, dan China".
2. Buku Leo Suryadinata, "Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia".
3. Buku Basuki Soejatmiko, "Etnis Tionghoa di Awal Kemerdekaan Indonesia"
4. Buku Leo Suryadinata, "Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia"
6. Buku Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, & Aris Ananta, "Penduduk Indonesia: Etnis dan Agama Dalam Era Pertahanan Politik".

3.2.2 Kritik Sumber

Tahapan kritik sumber merupakan proses verifikasi terhadap sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan pada tahap heuristik. Kritik sumber digunakan untuk uji validitas sumber-sumber sejarah (Daliman, 2015). Pada tahap ini sumber-sumber yang ada diverifikasi untuk diketahui otensitas dan kredibelitasnya untuk membedakan antara sumber yang benar-benar dapat dijadikan bahan penulisan (Helius, 2012).

Menurut Kuntowijoyo, kritik sumber dalam penelitian sejarah dilakukan melalui dua tahap, yaitu kritik Internal dan kritik eksternal. Kritik internal dilakukan untuk menilai isi atau kredibilitas informasi yang terdapat dalam sumber sejarah. Dalam tahap ini peneliti menganalisis isi dokumen, kesesuaian informasi, serta membandingkan dengan sumber lain yang relevan. Melalui kritik internal, peneliti dapat menilai sejauh mana informasi yang terdapat dalam sumber tersebut dapat dipercaya dan digunakan sebagai fakta sejarah.

Sementara itu, kritik eksternal dilakukan untuk menguji keaslian sumber sejarah. Pada tahap ini peneliti meneliti aspek fisis sumber, seperti bentuk dokumen tersebut. Kritik eksternal bertujuan untuk memastikan bahwa yang digunakan benar-benar berasal dari periode yang diteliti dan bukan merupakan sumber yang telah mengalami perubahan atau pemalsuan.

3.2.3 Interpretasi

Tahapan interpretasi yaitu penafsiran terhadap data dan fakta yang telah melalui verifikasi. Fakta-fakta yang telah didapat kemudian dihubungkan dan dikaitkan untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian. Kesimpulan tersebut akan membentuk suatu peristiwa sejarah. Dalam konteks penelitian ini, interpretasi dilakukan terhadap strategi bertahan pilihan agama Etnis Tionghoa di Teluk Betung dalam menghadapi kebijakan negara dimasa Orde Baru.

3.2.4 Historiografi

Historiografi adalah tahapan terakhir yakni proses menuangkan hasil penelitian ke dalam sebuah penulisan sejarah. Adapun Penulisan sejarah berupa pemaparan mengenai fakta sejarah yang telah di analisis. Dalam proses penulisan diperlukan kemampuan agar setiap fakta yang disajikan saling terhubung (Hamid, Rahman, & Madji, 2011). Penulisan sejarah disusun sistematis dan kronologis dengan tujuan agar mudah dipahami bagi para pembaca. Pada penulisan ini menggunakan judul “STRATEGI BERTAHAN: PILIHAN AGAMA ETNIS TIONGHOA DI TELUK BETUNG PADA MASA ORDE BARU (1970-1998) yang dapat dipahami pembaca terkhusus bagi yang membutuhkan penelitian dengan tema atau judul yang berkaitan.

3.3 Penentuan Informan

3.3.1 Informan

Informan adalah seseorang yang memiliki informasi relatif lengkap terhadap budaya yang akan di teliti (Endraswara, 2006). Informan menurut purposive sampling adalah individu yang dipilih secara sengaja da berdasarkan pertimbangan tertentu karena dianggap memiliki informasi yang relevan dengan topik penelitian.

Berdasarkan pendapat ahli di atas informan merupakan subjek penelitian yang harus mempunyai pengalaman tentang hal-hal yang menjadi latar belakang informasi yang dibutuhkan oleh peneliti agar informasi yang dibutuhkan terbukti secara valid.

3.3.2 Teknik Penentuan Informan

Menentukan informan yang akan dipilih oleh peneliti harus sesuai dengan pengetahuan atau pengalaman informan mengenai data yang akan di ambil oleh peneliti agar kedepannya data yang diperoleh peneliti dapat dipertanggungjawabkan oleh informan. Informan sebagai sumber informasi dan harus memenuhi syarat yang akan menjadi acuan kriteria peneliti:

- a) Strategi menentukan informan sesuai dengan kriteria yang berhubungan dengan peneliti
- b) Menetapkan informan dengan menentukan jumlah informan dengan karakteristik yang diinginkan oleh peneliti.
- c) Metode penetapan sampel yang ditetapkan diawal dan dilanjutkan dengan ditentukan dikemudian informan yang dibutuhkan (Sprandley dalam Miles, 1992).

Penelitian kualitatif tidak terpaku pada jumlah informan akan tetapi tergantung pada tepat tidaknya pemilihan informan. Demikian, informan ditentukan dengan Teknik *Purposive Sampling* (sampel bertujuan), yaitu Teknik penentuan informan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti menentukan responden berdasarkan kriteria, pertimbangan khusus, atau tujuan penelitian tertentu.

Teknik ini dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami pengalaman, pandangan, serta strategi bertahan Etnis Tionghoa di Teluk Betung dalam menentukan pilihan agama yang dicantumkan di KTP pada masa Orde Baru (1970-1998). Oleh karena itu, informan yang dipilih adalah individu yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman terhadap peristiwa sosial dan kebijakan negara pada masa tersebut.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Warga Etnis Tionghoa generasi tua (usia 60 tahun ke atas sekarang) yang tinggal di Teluk Betung pada masa Orde Baru (tahun 1970-1998) dan mengalami langsung kebijakan identitas Agama.
2. Asli berdomisili di Teluk Betung
3. Menyaksikan atau mengalami kebijakan kolom Agama Orde Baru 1970-1998. Teknik wawancara dilakukan secara semi terstruktur, yaitu dengan menggunakan panduan pertanyaan namun tetap memberi kebebasan kepada informan untuk menceritakan pengalaman dan pandangannya secara terbuka. Wawancara dilakukan ditempat yang nyaman bagi

informan, seperti rumah, tempat ibadah, atau kantor Lembaga terkait, dengan memperhatikan etika penelitian, izin informan, dan menjaga kerahasiaan narasumber.

Dengan Teknik purposive sampling ini, peneliti dapat memperoleh data yang relevan mendalam mengenai pengalaman Strategi Bertahan Etnis Tionghoa di Teluk Betung dalam menghadapi kebijakan identitas agama pada masa Orde Baru 1970-1998.

Adapun informan yang terdapat di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Informan Peneliti

No	Kategori	Jumlah	Keterangan
1.	Etnis Tionghoa generasi tua di Teluk Betung	1. Ongbihwa (Perempuan, 81 Tahun) 2. Suryani (Perempuan, 79 Tahun). 3. Devi (Perempuan, 59 Tahun) 4. Ci A Kim (Perempuan, 70 Tahun) 5. Meri (Perempuan, 75 Tahun)	Warga Etnis Tionghoa generasi tua (usia 60 tahun ke atas sekarang) yang tinggal di Teluk Betung pada masa Orde Baru (tahun 1970-1998) dan mengalami langsung kebijakan identitas Agama.

6. Tjan Eang Suan
(Elis) (Perempuan,
70 Tahun)

7. Li Wang Ping
(Karmila)
(Perempuan, 80
Tahun)

8. Dora
(Perempuan, 67
Tahun)

Sumber: *Hasil Penelitian Tahun 2025*

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau pendekatan untuk mengumpulkan data, yang bisa dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, observasi (pengamatan), studi pustaka, dan kuesioner (Hardani, 2020). Dalam mencari dan mengumpulkan sumber data peneliti mengunjungi perpustakaan dan tempat-tempat yang menyediakan data-data yang mendukung dalam penelitian ini dan melakukan wawancara terhadap narasumber yang dapat memberikan data yang penulis cari serta mengumpulkan dokumen-dokumen untuk mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data adalah sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah penelitian, karna dalam pengumpulan data peneliti memerlukan adanya cara yang digunakan agar sumber data bisa didapat untuk dilakukannya penelitian, diantaranya Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yakni:

3.4.1 Teknik Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Metode penelitian ini memiliki tujuan mengumpulkan data melalui sumber-sumber tertulis seperti buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, artikel, dokumen resmi, skripsi, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun sumber digital lainnya. Adapun

definisi studi Pustaka yang dikemukakan (Sarwono, 2010) dalam buku pintar menulis karya ilmiah, bahwasanya studi Pustaka adalah suatu Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, terkhususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

Dengan kata lain studi pustaka ini mencari dan mengumpulkan buku, tulisan, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian tentang keterkaitannya dengan STRATEGI BERTAHAN: PILIHAN AGAMA ETNIS TIONGHOA DI TELUK BETUNG PADA MASA ORDE BARU (1970-1998).

Melalui Teknik kepustakaan, peneliti memperoleh data sekunder berupa regulasi dan kebijakan negara Orde Baru, literatur tentang Etnis Tionghoa di Indonesia, serta kajian teoritis tentang Agama dan politik identitas yang berkaitan dengan kebijakan Orde Baru, identitas etnis Tionghoa, dan strategi bertahan. Data tersebut digunakan untuk membangun kerangka analisis dan memverifikasi temuan lapangan.

3.4.2 Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan atau maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (Narasumber) yang memberikan jawaban (Lexy J. Moleong, 2014). Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan yang diwawancarai (Noor, 2012).

Teknik wawancara merupakan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sang penjawab dan pewawancara dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*. Wawancara ialah metode untuk mengumpulkan data primer dari pihak-pihak terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui tanya jawab dengan informan yaitu tokoh masyarakat Etnis Tionghoa di Kelurahan Pesawahan Teluk Betung.

Adapun Langkah-langkah Teknik pelaksanaan wawancara ke informan yaitu sebagai berikut:

1. Menghubungi narasumber untuk menanyakan kesediaan dan waktu di wawancara.
2. Menyiapkan instrumen pertanyaan
3. Peneliti menuliskan identitas informan dengan lengkap.
4. Peneliti mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh responden terkait penelitian.
5. Peneliti menerapkan wawancara yang bersifat lentur, terbuka, dan tidak terstruktur ketaat, tetapi dengan pernyataan yang semakin focus dan mengarah pada pembahasan peneliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur, pewawancara dilakukan penyusunan pertanyaan wawancara untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diteliti, pewawancara memberikan pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, pewawancara bebas berimprovisasi dalam mengajukan pertanyaan sesuai dengan tujuan dan alur yang ditentukan (Herdiansyah, 2012b)

Berdasarkan pendapat ahli di atas peneliti menggunakan wawancara Semi-struktur pada penelitian wawancara semi struktur yang biasanya bersifat kualitatif, wawancara ini terdiri dari batang pertanyaan yang dapat direspon secara bebas, kemudian diikutidengan pertanyaan lanjutan berdasarkan rencana pertanyaan atau jawaban yang muncul dari tanggapan informan.

Wawancara semi-struktur digunakan ketika peneliti cukup tahu tentang topik atau fenomena sosial yang diteliti, missal batas-batas topik dan apa yang tidak berkaitan. Dengan pertanyaan penelitian tetapi tidak tahu dan tidak dapat mengantisipasi semua jawaban. Pertanyaan diajukan kepada semua responden dalam urutan yang sama wawancara ini dapat dilakukan secara tatap muka dalam format tertulis atau melalui telepon, karena pertanyaan tidak dapat diubah begitu pengumpulan data dimulai.

Pengujian narasumber terhadap pertanyaan itu penting untuk memastikan bahwa pertanyaan mencakup topik penelitian dan bahwa tanggapan yang diharapkan diperoleh, data dianalisis sekaligus Pada akhir pengumpulan data. Analisis data wawancara semi struktur dapat dilakukan analisis tematik. Pelaksanaan pada wawancara semi struktur sebagai berikut:

1. Membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai waktu untuk mendapat informasi
2. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara
3. Peneliti menambahkan beberapa pertanyaan di luar pertanyaan yang terdapat di pedoman wawancara untuk semakin memperdalam penelitian
4. Informasi dari wawancara dengan informan dicatat hal-hal yang penting yang disampaikan oleh informan dalam wawancara.
5. Wawancara pada setiap subjek penelitian berbeda-beda. Ada yang suatu kali wawancara ada yang dua kali wawancara tergantung peneliti membutuhkan informasi yang lebih jelas.

Pedoman wawancara ini bersifat semi-struktur, sehingga memungkinkan peneliti mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai dengan konteks dan pengalaman informan. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman subjektif, administratif serta strategi bertahan Etnis Tionghoa dalam merespons kebijakan negara pada masa Orde Baru.

3.4.3 Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan bukti atau gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang dibuat langsung oleh subjek yang berkaitan (Herdiansyah, 2012a).

Dalam jurnal ilmiah, teknik dokumentasi merujuk pada metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menyajikan, dan mengorganisir informasi dalam suatu dokumen ilmiah (Sanasintasi, 2020). Sugiyono dalam (Haryono, 2023) menyatakan bahwa dokumentasi dapat terdiri dari

dokumen cetak maupun digital, termasuk buku, majalah, jurnal, artikel, notulen, laporan, catatan, video, foto, dan berbagai bentuk lainnya.

Menurut (Mardawani, 2020) dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengambilan informasi dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang terkait dengan subjek atau responden, baik berupa tulisan, gambar, bahkan karya monumental.

Berdasarkan pemaparan makna dokumentasi diatas, data dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu berupa fotografi. Fotografi digunakan untuk mendokumentasikan data yang dianggap perlu untuk diabadikan, sehingga ada bukti nyata yang dapat dilihat. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara peneliti melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung serta foto wawancara Bersama informan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data historis, yaitu proses menganalisis fakta-fakta sejarah yang diperoleh dari berbagai sumber untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau secara sistematis. Menurut Kuntowijoyo (2003), dalam penelitian sejarah analisis dilakukan melalui proses interpretasi terhadap fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh melalui tahapan heuristik dan kritik sumber (Kuntowijoyo, 2003).

Data yang diperoleh dari arsip, dokumen kependudukan, serta hasil wawancara dengan masyarakat etnis Tionghoa di Teluk Betung kemudian di analisis dengan cara menafsirkan serta menghubungkan berbagai fakta sejarah yang ditemukan. Proses analisis dilakukan dengan melihat keterkaitan antara kebijakan negara pada masa Orde Baru dengan pilihan identitas agama etnis Tionghoa dalam dokumen kependudukan (Dudung, 2007).

Melalui analisis historis tersebut, peneliti berupaya memahami latar belakang, proses, serta dampak dari kebijakan kolom agama terhadap pembentukan identitas agama Etnis Tionghoa di Teluk Betung pada masa Orde Baru. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dan kronologis dalam bentuk penulisan sejarah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Louis Gottschalk (1985), penulisan sejarah merupakan proses rekonstruksi masa lampau yang disusun berdasarkan fakta-fakta sejarah yang telah dianalisis secara kritis

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Bertahan: Pilihan Agama Etnis Tionghoa di Teluk Betung pada Era Orde Baru (1970–1998), dapat disimpulkan bahwa mayoritas etnis Tionghoa di Teluk Betung memilih agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik, sebagai identitas resmi dalam KTP bukan semata-mata karena faktor keyakinan, melainkan sebagai bentuk strategi bertahan menghadapi kebijakan diskriminatif pada masa Orde Baru. Kebijakan pemerintah, seperti Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dan kewajiban mencantumkan agama resmi dalam identitas kependudukan, mendorong masyarakat Tionghoa untuk menyesuaikan identitas mereka demi memperoleh rasa aman, kemudahan administrasi, serta menghindari stigma dan diskriminasi sosial.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi tersebut dapat dijelaskan melalui teori James C. Scott. Dalam public transcript, masyarakat Tionghoa menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan negara dengan menggunakan agama Kristen sebagai identitas resmi. Namun, dalam hidden transcript, sebagian keluarga tetap mempertahankan tradisi penghormatan kepada leluhur dan nilai-nilai budaya Tionghoa secara tertutup. Sikap menghindari konflik, memilih diam, dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan negara merupakan bentuk everyday forms of resistance, sedangkan keseluruhan tindakan tersebut mencerminkan survival strategy untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di tengah tekanan politik pada masa Orde Baru.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa berakhirnya kebijakan diskriminatif melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan ruang bagi etnis Tionghoa untuk kembali mengekspresikan identitas budaya dan agamanya secara terbuka. Berdasarkan hasil wawancara, penelitian ini menemukan bahwa pilihan agama

Kristen yang pada awalnya dilakukan sebagai bentuk keterpaksaan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan negara, dalam perkembangannya pada sebagian besar informan berubah menjadi keyakinan yang diterima secara sadar. Seiring berjalannya waktu, agama yang semula dipilih sebagai strategi bertahan tidak lagi sekadar menjadi identitas administratif, tetapi telah menjadi bagian dari keyakinan dan hati nurani mereka. Dengan demikian, pilihan agama etnis Tionghoa di Teluk Betung tidak hanya mencerminkan bentuk adaptasi terhadap tekanan politik pada masa Orde Baru, tetapi juga menunjukkan adanya transformasi dari kepatuhan karena keadaan menjadi pilihan iman yang diyakini secara pribadi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak. Bagi penelitian selanjutnya, kajian ini masih terbatas pada wilayah Teluk Betung sehingga diperlukan penelitian komparatif di daerah lain yang memiliki komunitas etnis Tionghoa dengan karakteristik berbeda. Hal tersebut penting untuk melihat variasi strategi bertahan dan pilihan identitas agama dalam konteks sosial, budaya, dan politik yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan kajian akademik yang lebih interdisipliner melalui pendekatan sejarah, sosiologi, dan antropologi agar hubungan antara negara, agama, dan identitas minoritas di Indonesia dapat dipahami secara lebih mendalam. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan administratif negara dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap identitas budaya kelompok minoritas.

Pemerintah diharapkan lebih peka terhadap pengalaman historis masyarakat minoritas dengan menghadirkan kebijakan kependudukan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menciptakan rasa aman, kesetaraan, dan kepercayaan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Sementara itu, bagi masyarakat dan institusi sosial maupun keagamaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dorongan untuk menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif guna menjaga keberlanjutan identitas budaya etnis Tionghoa tanpa rasa takut ataupun

stigma sosial. Dengan demikian, tradisi, budaya, dan identitas etnis Tionghoa dapat tetap diwariskan kepada generasi muda sebagai bagian dari keberagaman masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (n.d.). *Sekolah SR/SMP Tionghoa Sin Tjung (Sincung)*.
Geography: Realms, regions, and concepts. (n.d.). John Wiley & Sons.
Informan Etnis Tionghoa di Teluk Betung Generasi Tua. *Arsip Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI)*. Dokumen pribadi, diakses melalui arsip milik informan.
KITLV Leiden, Belanda. (1894). *Lokasi Pelabuhan Teluk Betung (Pelabuhan Cungkeng)*. Diabadikan oleh Onbekend.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1978). *Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978*. <https://www.mpr.go.id>
Republik Indonesia. (1967). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967*. <https://www.mpr.go.id>
Republik Indonesia. (2000). *Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000*. <https://www.mpr.go.id>

Buku

- Coppel, C. A. (1983). *Indonesian Chinese in crisis*. Oxford University Press.
Daliman. (2015). *Metode penelitian sejarah*. Penerbit Ombak.
Dawis, A. (2010). *Orang Indonesia Tionghoa mencari identitas*. Gramedia Pustaka Utama.
Dawis, A. (2013). *Orang Indonesia Tionghoa mencari identitas*. Gramedia Pustaka Utama.
Dudung, A. (2007). *Metodologi penelitian sejarah*. Ar-Ruzz Media.
Endraswara, S. (2006). *Metode, teori, teknik penelitian kebudayaan*.
Gottschalk, L. (n.d.). *Mengerti sejarah*. UI Press.
Hamid, R., & Madji, S. M. (2011). *Pengantar ilmu sejarah*. Ombak.
Hardani, dkk. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu Grup.
Helius, S. (2012). *Metodologi sejarah*. Ombak.
Herdiansyah, H. (2012a). *Metode penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Salemba Humanika.
Herdiansyah, H. (2012b). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Salemba Humanika.
Heryanto, A. (2006). *State terrorism and political identity in Indonesia: Fatally belonging*. Routledge.
Hoon, C. Y. (2008). *Chinese identity in post-Suharto Indonesia*. Gramedia.

- Hoon, C. Y. (2012). *Identitas Tionghoa: Pasca Suharto—Budaya, politik, dan media*. LP3ES.
- Kuntowijoyo. (2003). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.
- Laski, H. J. (1931). *An introduction to politics*. Allen & Unwin.
- Lexy J. Moleong. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Lohanda, M. (2007). *Sejarah para pembesar mengatur Batavia*. Masup.
- Map, C. (2018). *Menentang marginalisasi: Politik kewarganegaraan dan perjuangan penghayat kepercayaan*. KLUP MBK UGM.
- Mardawani. (2020). *Praktis penelitian kualitatif*. CV Budi Utama.
- Noor, J. (2012). *Metodologi penelitian*. Kencana Prenada Media Group.
- Pratama, Rinaldo Adi dan Yusuf Perdana. 2022. *Sejarah Indonesia Masa Orde Baru Hingga Reformasi*. Penerbit Lakeisha.
- Pratiwo. (2010). *Arsitektur tradisional Tionghoa dan perkembangan kota*. Ombak.
- Purdey, J. (2006). *Anti-Chinese violence in Indonesia 1996–1999*. NUS Press.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia modern*. Serambi.
- Sanasintasi. (2020). *Penelitian kualitatif*. Selaras.
- Schwarz, A. (1994). *A nation in waiting: Indonesia's search for stability*. Westview Press.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press, hlm. 29.
- Scott, J. C. (1990). *Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts*. Yale University Press.
- Setiawan, H. (2010). *Arsitektur, lingkungan dan perilaku: Pengantar ke teori metodologi dan aplikasi*. Gadjah Mada University Press.
- Sulasman. (2014). *Metodologi penelitian sejarah: Teori, metode, dan contoh aplikasi*. Pustaka Setia.
- Sumargono. 2021. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Lakeisha
- Sumadi Suryabrata. (2012). *Metode penelitian*. CV Rajawali.
- Suryadinata, L. (2002). *Negara dan etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. LP3ES, hlm 76.
- Suryadinata, L. (2003). *Etnis Tionghoa dan integrasi nasional*. LP3ES, hlm. 120.
- Suryadinata, L. (2008). *Etnis Tionghoa dan nasionalisme Indonesia*. LP3ES.
- Suryadinata, L. (2023). *Pribumi, minoritas Tionghoa, dan China*. PT Kompas Media Nusantara, hlm. 69.
- Tajfel, H. (1981). *Human groups and social categories*. Cambridge University Press.
- Tan, M. G. (1991). *Etnis Tionghoa di Indonesia: Kumpulan tulisan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Weber, M. (1922). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.

Jurnal

- Amaruli, R. J. (2015). Konversi agama dan formasi identitas: Tionghoa Muslim Kudus–Indonesia Orde Baru. *Jurnal Humanika*, 22.
- Amirullah, A. (2023). Sejarah perkembangan etnis Tionghoa Muslim Palembang. *Jurnal Magister Sejarah Peradaban Islam*.
- Arifin, M. (2019). Peran perspektif Indonesia-sentris dalam membangun identitas nasional di kalangan pelajar. *Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 12(4), 33–48.

- Cribb, R. (2001). Sejarah diskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia. *Jurnal Humaniora*.
- Cristandi, L. (2024). Agama Konghucu adalah agama: Sebuah analisis wacana kritis terhadap publikasi komunitas Konghucu di masa Orde Baru. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*.
- Ema Agustina, Aprilia Triaristina, Yustina Sri Ekwandari, Myristica Imanita, (2025). Menelusuri Jejak Transmigrasi Di Lampung Melalui Koleksi Museum. *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*
- Erman, E. (2010). Politik protes dan etnisitas: Kasus buruh China di tambang timah di Bangka Belitung 1920–1950. *Masyarakat Indonesia*.
- Faisal, A. (2025). Dinamika sosial ekonomi etnis Tionghoa dengan Jawa di Kecamatan Welahan dari masa Orde Baru sampai Reformasi. *Unnes Journal of Mathematics Education*.
- Haryono, E. (2023). Metodologi penelitian kualitatif di perguruan keagamaan Islam. *E-Journal of Islamic Studies*.
- Lan, T. J. (2014). Masalah Cina: Konflik etnis yang tak kunjung selesai. *Antropologi Indonesia*.
- Laylatul, F. (2013). Tionghoa dalam diskriminasi Orde Baru tahun 1967–2000. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (1999). Diskriminasi terhadap warga keturunan Tionghoa.
- Lisa, D., Yunita, K., & Kelik Hendro, B. (2022). Kawasan Teluk Betung sebagai historical urban landscape (HUL). *Prosiding SINTA*, 5. <http://plpbknegeriolokgading.blogspot.com/2016/05/n>
- Octadynata, A., Persada, C., Prasetyo, E., Pascasarjana, F., Lampung, U., Pascasarjana, F., & Lampung, U. (2020). Rancangan kawasan Kota Tua Teluk Betung Selatan sebagai destinasi wisata Kota Bandar Lampung. 5(2), 96–107.
- Prihatanti, Maskun, & Syaiful, M. 2013. Tinjauan historis tentang keterlibatan militer dalam pemerintahan Soeharto pada masa awal Orde Baru. *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah (PESAGI)*.
- Purba, R. M., Susanto, H., Perdana, Y., & Ekwandari, Y. S. 2022. Dwifungsi ABRI dalam sosial politik sebagai gerakan akar rumput pada masa Orde Baru. *KRAKATOA: Journal of History, History Education and Cultural Studies*.
- Qodir, Z. (2012). Agama dan identitas sosial dalam perspektif sosiologi. *Jurnal Sosiologi Reflektif*.
- Reza Agustina. (2019). Dampak kerusuhan Mei 1998 terhadap kehidupan etnis Cina di Kota Palembang tahun 1998–2003 (Thesis).
- Samhudi, G. R. (2016). Pencantuman aliran kepercayaan dalam kolom agama pada kartu tanda penduduk (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016). *Kosmik Hukum*.
- Sibawati, I. (2025). Eksistensi etnis Cina di bawah pemerintahan Orde Baru, 1966–1998. *TAMADDUN: Jurnal Ilmu Sosial, Seni, dan Humaniora*.
- Sodikin, R. A. (2003). Konsep agama dan Islam. *Alqalam*, 20(97), 1. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v20i97.643>
- Sukmana, W. (2021). Metode penelitian sejarah (metode sejarah). *Seri Publikasi Pembelajaran*.

- Suryadinata, L. (2014). Kebijakan negara Indonesia terhadap etnik Tionghoa: Dari asimilasi ke multikulturalisme. *Antropologi Indonesia*.
- Tajfel, H. (1974). Social identity and intergroup behavior. *Social Science Information*.
- Tanggok, M. I. (1998). Agama Konghucu di Indonesia: Perjuangan mencari identitas. *Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*.
- Wakindiyah, N. (2023). Migrasi etnis Tionghoa ke Indonesia: Analisis peran dan kontribusi komunitas Tionghoa dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. *Ranah Sejarah*.
- Yuliati, D. (2019). Mengungkap sejarah Kota Lama Semarang dan pengembangannya sebagai aset pariwisata budaya. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 3(2), 157–171. <https://doi.org/10.14710/anuva.3.2.157-171>

Skripsi atau Tesis

- Angelia, V. (2022). *Pemaknaan ritual sembahyang arwah “Qing Ming” bagi masyarakat Tionghoa Bandar Lampung* [Skripsi, Universitas Multimedia Nusantara].
- Utama, W. S. (2012). *Kehidupan sosial budaya Tionghoa di Batavia 1900–1930-an* [Skripsi, Universitas Gadjah Mada].